BAB II

GAMBARAN UMUM PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai dengan menggunakan perkataan nikah dan *ziwaaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti yaitu arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Arti yang sebenarnya daripada nikah ialah *dham* yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedangkan arti kiasanya ialah *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Dalam bahasa sehari-hari orang lebih banyak mengatakan nikah dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya. Bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.²¹ Dalam bahasa hukum positif perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME).²²

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini meskipun ada juga

²¹. Ali Maqri Al Fayumi, *Almisbahu'l Munir*, Kairo hlm 295 dan 296 sebagaimana dikutip oleh Kamal Muchtar, *Op.Cit*, hlm.11

²² . Lihat pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, dan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hlm. 537

sebagian orang yang tidak “terikat”²³ dengan perkawinan. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 (3) c. menyebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Mengenai definisi perkawinan dalam KHI dilanjutkan dalam pasal 2 yang menyebutkan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Di kalangan ahli fiqh terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah nikah merupakan ibadah atau perkara keduniaan biasa, sebagaimana makan dan minum. Perbedaan pendapat itu nampak *pertama*, menurut Abu Hanifah, nikah adalah ibadah karena dua alasan:

- a. Dengan pernikahan, akan lahir keturunan sebagaimana yang diharakan. Sebab tujuan utama (*maqashid awwaliyat*) pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan (*li al-tanasul*). Pendapat imam Abu Hanifah ini sama dengan pendapat Imam Malik.

²³. Dalam suatu agama ada sebagian orang yang memang dengan sengaja menghindari perkawinan. Menghindar dari perkawinan yang dimaksud diatas karena suatu keyakinan yang merupakan jalan hidup yang dipilihnya.

²⁴. Lihat dalam KHI buku pertama yang membahas mengenai perkawinan. Lihat pula Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonsia*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1994), hlm. 77.

b. Pernikahan penting dilakukan agar seorang terhindar dari zina.

Islam adalah agama yang mengharamkan zina. pezina *muhshan* akan dirajam dan pezina *ghair muhsan* dipukul 100 kali.²⁵

Kedua, karena dorongan biologis itu ada dalam diri setiap orang, maka tanpa diwajibkan pun hubungan seksual akan tetap berlangsung. Syari' (Tuhan) tidak mewajibkan sesuatu yang nyata ada dalam naluri manusia. Sekiranya Tuhan mewajibkan sesuatu itu, maka kewajiban itu tidak banyak gunanya. Dengan argumen ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum dasar pernikahan adalah mubah.

Sehingga melakukan pernikahan tidak dipandang sebagai ibadah oleh Imam Syafi'i. Al-Zabidi dalam *Ittihaf al-Sadat al-Muttaqin*, mengutip pendapat Imam Syafi'i tersebut bahwa "Sesungguhnya pernikahan itu bagian dari (penyaluran) syahwat dan bukan bagian dari upaya pendekatan dari Tuhan.....(pernikahan bukan ibadah)".²⁶

Pendapat Imam Syafi'i ini juga dikutip oleh Syatha al-Dimyathi dalam *Kifayat al-Atqiya' wa Minhaj al-Ashfiya' ila Thariqat al-Awaliya'*, salah satu kitab tasawuf yang populer di lingkungan pesantren Jawa. Kutipanya demikian "nikah menurut Imam Syafi'i adalah mubah dan

²⁵. Pezina *muhshan* adalah orang yang sedang sedang berbeda dalam ikatan perkawinan yang sah atau sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah kemudian melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya atau dengan laki-laki yang bukan suaminya. Hukuman rajam bagi pezina *muhshan* ada dalam ayat yang sudah terhapus tulisanya. Artinya begini; *laki-laki dan perempuan yang sudah tua jika melakukan perjinaan, maka rajamlah secara langsung*. Sedangkan pezina *ghair muhsan* adalah laki-laki atau perempuan yang tidak pernah menikah secara resmi kemudian melakukan hubungan seksual diluar perkawinan. Allah berfirman; "Pezina laki-laki dan perempuan, maka pukullah olehmu masing-masing 100 kali pukullan" (Qs. Al-Nur (24): 2).

²⁶. Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, (DEPOK; KataKita; 2009) hlm. 326

bukan ibadah”. Pendapat ini diikuti ulama madzhab Syafi’i, seperti Abu Ishaq al-Syayarazi. Ia berpendapat, pernikahan adalah perkara *jawaz* fakultatif (tidak diwajibkan atau hanya sebuah pilihan).²⁷

B. Pengertian Aliran Kepercayaan

Aliran-aliran Kepercayaan (Kebatinan) merupakan aliran kerohanian yang sukar didefinisikan secara tepat. Mengemukakan definisi aliran Kepercayaan sama sukarnya mengemukakan definisi agama serta lembaga-lembaga kerohanian lainnya. Bahkan jika dihadapkan seringkali menambah kaburnya persoalan atau menimbulkan salah paham. H. M. As’ad El Hafidy, penghayat adalah suatu cabang dari pada faham yang rentannya masih berinduk dari salah satu agama (madzhab, orde, sekte dan lain-lain).²⁸ Sedangkan kata kepercayaan menurut ilmu makna kata (semantik), mempunyai beberapa arti:

- a. Iman kepada agama.
- b. Anggapan (keyakinan) bahwa benar sungguh ada, misalnya kepada dewa-dewa dan orang-orang halus.
- c. Dianggap benar dan jujur, misalnya orang kepercayaan.
- d. Setuju kepada kebijaksanaan perintah atau pengurus.²⁹

²⁷. Meskipun demikian perkara-perkara keduniaan (*a mal al-dunya*) seperti pernikahan bisa berganti menjadi perkara keakhiratan (*a mal al-akhirat*) sekiranya diniati dengan niat keakhiratan, seperti misalkan untuk menjaga diri dari perzinahan. Sebagaimana Nabi bersabda, “tak sedikit tindakan yang secara formal-lahiriyah tampak sebagai pekerjaan akhirat berubah menjadi amal keduniaan karena niat buruk yang menyertainya”. *Ibid*, hlm. 330

²⁸. H. M. As’ad El Hafidy, *Op.Cit*, hlm. 13.

²⁹. <http://sofiswa.blogspot.com>, di unduh pada, Rabu, (5/8/12).

Kata kepercayaan menurut istilah (terminologi) di Indonesia ialah keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) di luar agama atau tidak termasuk ke dalam agama. Pengertian tersebut di atas adalah pengertian kepercayaan yang diberikan oleh Prof. Kamil Karthapraja di dalam bukunya *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*. Sementara A.L. Huxley di dalam bukunya *The Perennial Philosophy*, seseorang pengarang dan ahli filsafat di negeri Inggris, menyebutkan empat arti:

- a. Percaya/mengandalkan (kepada orang tertentu).
- b. Percaya (*faith*) kepada wibawa (dari para ahli di suatu bidang ilmu pengetahuan).
- c. Percaya (*belife*) kepada dalil-dalil yang kita sendiri tidak dapat menceknya, apabila kita mempunyai kesediaan, kesempatan, dan kemampuan untuk itu.
- d. Percaya (*belife*) kepada dalil-dalil, yang kita ketahui, bahwa kita tidak dapat menceknya, sekalipun kita menghendaknya.³⁰

Huxley berpendapat, bahwa ketiga arti yang pertama mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan dalam arti yang keempat itu dipandangnyasama dengan apa yang biasa disebut “kepercayaan agamani”. Kamus umum Purwadarminto 1976, menyatakan bahwa kepercayaan mempunyai pengertian:

- a. Anggapan atau keyakinan bahwa benar (ada, sungguh-sungguh).

³⁰. K. Permadi, *Pandangan Aliran Kepercayaan terhadap Islam* (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI. Direktorat Jendral Kebudayaan. Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 1992-1994), hlm. 8

b. Sesuatu yang dipercayai (dianggap benar).

Menurut Prof. Kamil Kartapradja, aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam:

1. Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya, seperti kepercayaan orang-orang Perlamina dan Pelebegu di Tapanuli.
2. Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangannya akhirnya menamakan dirinya sebagai golongan Kepercayaan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Aliran Kepercayaan masyarakat yang bersumber kepada budaya luhur bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, karsa dan rasa manusia, yang berbentuk atau berwujud kepercayaan budaya, meliputi aliran kebatinan, kejiwaan, kerokhanian atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama dan tidak mengarah kepada pembentukan agama baru, dalam arti bahwa identitas tuntunan yang dianut adalah produk interaksi bebas dalam menghayati keterlibatan atau

³¹. H. M. As'ad El Hafidy, *Op.Cit*, hlm. 48

keterjalinan hubungan dan keterkaitan atau ketergantungan hidup manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.³²

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah filsafat dalam arti produk olah pikir. Ia dihayati melalui pemusatan kesadaran yang utuh atau penghayatan budaya spiritual dalam pernyataan diri sepenuhnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hingga memperoleh tuntunan-Nya dalam wujud perilaku pribadi yang disertai hukum serta ilmu yang mengelola sikap penghayatan rohani, dan pelaksanaan serta pengamalannya dalam kehidupan pribadi dan sosial kemasyarakatan.³³

C. Pencatatan Perkawinan Bagi Pemeluk "Agama Resmi"

Perkawinan yang sah di Indonesia apabila memenuhi persyaratan dalam undang-undang yang berlaku mengenai perkawinan. Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia diantaranya UU nomor 1 tahun 1974. Kemudian penjelasan undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkandung dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 9 tahun 1975. Perundang-undangan selanjutnya yang mengatur mengenai perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³². Memang pengertian kebatinan atau penghayat sangat sulit untuk dilukiskan dengan rumusan kata-kata, tetapi anehnya lebih mudah dimengerti dengan perasaan, jadi pengertian kebatinan lebih mudah dicapai dengan rasa dari pada dengan akal. K. Permadi, *Op.Cit*, hlm. 19.

³³. Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Indonesia), *Aneka pengertian dalam pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm. 14.

KHI ini merupakan tafsir atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan tata cara perkawinan agama Islam.³⁴ Dalam bab pertama undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasala 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵ Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan mengenai perkawinan yang sah yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. dilanjutkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Mengenai syarat sahnya perkawinan undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengaturnya dalam pasal 6 (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ayat (2) menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam ayat (5) ditegaskan kembali bahwa pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

³⁴. Moh. Rosyid, *Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin, Op.Cit*, hlm. 46

³⁵ Pertimbangan dari pasal di atas adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting.

³⁶. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit* hlm. 538

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).³⁷ Di bagian akhir dalam bab persyaratan perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu dalam pasal 12 dijelaskan bahwa tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.³⁸

Mengenai teknis tata cara perkawinan dan teknis pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975. Dalam PP sangat lengkap dijelaskan urutan tata cara perkawinan hingga calon mempelai mendapatkan akta perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai berbagai tata cara perkawinan. Terkhusus bagi agama Islam. Dalam KHI dijelaskan secara rinci termasuk

³⁷. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 2.

³⁸. *Ibdi*.

ketika awal mula perkenalan dengan seorang perempuan. Dalam bahasa KHI dikenal dengan cara peminangan.³⁹

D. Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Pencatatan Perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik yang menarik untuk dibahas, hal ini disebabkan karena adanya berbagai macam pendapat yang selalu muncul. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama untuk menyelesaikan perkara dalam lingkungan peradilan tidak terdapat satu pun ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya pencatatan, baik itu sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi hampir setiap peraturan perundang-undangan negara menyatakan dengan jelas tentang berbagai hal kewajiban yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.⁴⁰

Pencatatan dalam suatu perkawinan di Indonesia merupakan syarat sahnya perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum pencatatan perkawinan induknya adalah yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

³⁹. Dalam KHI Pasal 4 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi memang KHI disini sedang memposisikan peraturan ini hanya untuk pemeluk agama Islam. Sehingga bahasa yang dipakai dalam KHI juga sangat kental dengan fiqh Islam.

⁴⁰. Meskipun perkawinan di Indonesia sudah diatur dengan sangat rinci namun ternyata aplikasi di lapangan masih banyak menyisakan berbagai persoalan.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pp RI nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan presiden republik Indonesia.⁴²

Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahawa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.⁴³

Dalam pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan juga perundang-undangan yang menjelaskannya. Mengenai pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan selanjutnya diatur dalam undang-undang administrasi dan kependudukan (adminduk) negara yaitu

⁴¹. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Artinya dalam suatu rencana perkawinan tidak boleh jika perkawinan itu bermaksud untuk melakukan poligami.

⁴². New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Galang Press, 2009), hlm. 26.

⁴³. *Ibid*, hlm. 29.

undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.⁴⁴

Dalam pasal 34 ayat (1) dijelaskan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Dalam bab persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan pasal 81 ayat (1) menerangkan bahwa perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.⁴⁵

Kemudian ayat (2) selanjutnya dijelaskan bahwa pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁶

Selanjutnya dalam pasal 82 dijelaskan bahwa peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada

⁴⁴. Harun Nur Rosyid, dkk, *Pedoman Pelestarian Kepercayaan Masyarakat Jakarta; Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan*, (Kementerian dan Kebudayaan Pariwisata, 4004), hlm 27.

⁴⁵. Abdul Mutholib Ilyas, Abdul Ghofur Imam, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, (Surabaya; Amin, 2998), hlm 12

⁴⁶. *Ibid*, hlm. 13.

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. fotokopi KTP;
- c. pas foto suami dan istri;
- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.⁴⁷

Dalam ayat (2) selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masih dalam undang-undang adminduk bahwa pasal 83 ayat (1) pejabat instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:

- a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
- c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.⁴⁸

⁴⁷. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diterbitkan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cet.2 tahun 2006. hlm. 47.

⁴⁸. *Ibid.*

Dalam ayat (2) diterangkan pula bahwa kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.⁴⁹

Dengan demikian para pengamal penghayat kepercayaan telah mendapat keleluasaan untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan berdasarkan kepercayaan yang mereka dianutnya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.

Terlebih penghayat kepercayaan tersebut telah sah mempunyai pemuka aliran yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain oleh pemerintah pemuka penghayat kepercayaan juga harus atas dasar penunjukan dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaannya untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatruir mengenai pencatatan perkawinan penghayat aliran kepercayaan nampaknya juga selaras dengan konstitusi kita Undang Undang Dasar (UUD) 1945.⁵⁰ UUD 1945 secara tegas mengakui agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Jika dikaji dari definisi agama

⁴⁹. Harun Nur Rosyid, dkk, *Op.Cit.* hlm. 29.

⁵⁰. wahidinstitute.org, Ahmad Suaedy, Opini, Kebebasan Beragama dalam Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia, Jum'at, (02/24), diunduh pada, Minggu, (13/9).

memang aliran penghayat kepercayaan tidak bisa dikategorikan kedalam agama.

Namun dalam pasal 29 UUD 1945 (2) menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Secara keseluruhan, baik UUD 1945 yang asli maupun hasil amandemen, tidak terdapat unsur pembedaan dan diskriminasi bagi pemeluk agama dan keyakinan tertentu, termasuk perbedaan berdasarkan etnis dan ras. Bahkan dalam UUD 1945 amandemen ditegaskan kembali kebebasan beragama dan kepercayaan dalam pasal 28, khususnya huruf E ayat 1 dan 2.⁵¹

⁵¹. Demikian perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dari mulai undang-undang dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi Negara ini juga mengakui eksistensi aliran penghayat kepercayaan. Karena itu, perundang-undangan dibawahnya juga harus selaras tanpa ada substansi yang berseberangan dengan konstitusi undang-undang dasar.